



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 122 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;

- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan
- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.

- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 122

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 122 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

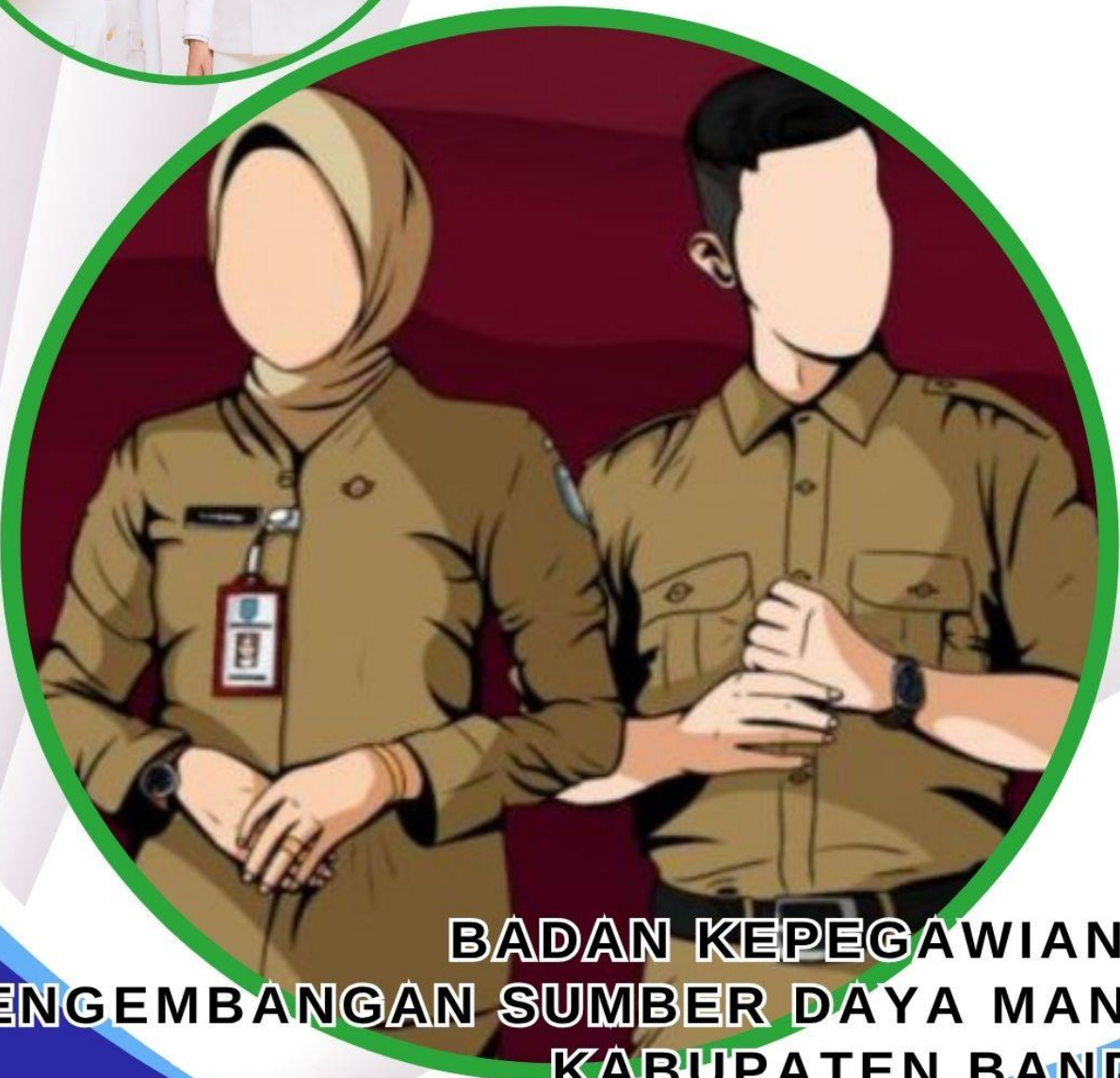
Pemerintah
Kabupaten Bandung



BUPATI BANDUNG PERATURAN



PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



**BADAN KEPEGAWIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANDUNG**

KATA PENGANTAR



Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bandung adalah kumpulan individu yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung. Mereka memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tugas dan Tanggung Jawab ASN Kabupaten Bandung antara lain:

1. **Pelaksanaan Kebijakan Publik:** ASN berperan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung.
2. **Pelayanan Publik:** ASN memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat.
3. **Pembangunan Daerah:** ASN berkontribusi dalam pembangunan daerah, baik dalam bidang infrastruktur, ekonomi, maupun sosial budaya.
4. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:** ASN bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang berorientasi pada masyarakat.

Berkenaan tugas dan fungsi tersebut selain dari aspek penyelenggaraan pelayanan publik tentunya tidak terlepas dari aspek perencanaan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam penyusunan perencanaan mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kodifikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah. Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan renja, dan tahap penetapan renja. Penyusunan Renja merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan publik, BKPSDM Kabupaten Bandung Tahun 2025 bermaksud meningkatkan kinerjanya untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 dengan dukungan sumber pembiayaan/anggaran terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan urusan kepegawaian dan urusan pendidikan dan pelatihan.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran BKPSDM Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Semoga melalui Rencana Kerja Perubahan ini, diharapkan BKPSDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diselenggarakan secara optimal serta dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, masyarakat maupun swasta yang membutuhkannya.

Soreang, 2 Juni 2025

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bandung



KUSNAWAN, SE., M.Ip.
NIP. 721115 199803 1 005



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABELiv

BAB I PENDAHULUAN1

1.1. Latar Belakang1

1.2. Landasan Hukum.....2

1.3. Maksud dan Tujuan3

1.4. Sistematika Penulisan4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021-20266

2.1.1 Capaian Keberhasilan Program6

2.1.2 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra13

2.1.3. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan, Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut:.....14

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung.....21

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung.....24

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD25

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat35

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....36

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....36

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 202536

BAB IV RENCANA PENDANAAN50

4.1. Kebutuhan Anggaran Belanja BKPSDM50

BAB V PENUTUP60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 20247

Tabel 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM (TC.29.) 15

Tabel 3 Analisa Capaian Kinerja BKPSDM Sampai Tahun 2024 (T-C.30.)23

Tabel 4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD (T-C.31)26

Tabel 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPSDM 2025 - 2029.....37

Tabel 6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM38

Tabel 7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 (T-C.33)42

Tabel 8 Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja BKPSDM Tahun 202552

Tabel 9 Pengendalian Dan Evaluasi Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Form E.70)62

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Selain itu, Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang beedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Bandung harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-P SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025, adalah:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 Tanggal 22 Desember 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 Tanggal 28 Mei 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025;
10. Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/Kep.107-Bappelitbangda/2023 Tanggal 20 Januari 2023 tentang Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
11. Surat Edaran Bupati 000.8./048/959C/BAPPERIDA tanggal 25 Maret 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung pada tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Menjadi acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
- Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara tead, terarah dan terukur;
- Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung
- 2.4 *Review* terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025
- 3.3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 terdapat pelaksanaan 3 (Tiga) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 55 (Lima Puluh Lima) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 50.014.486.578,- (Lima Puluh Milyar Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), Anggaran yang direncanakan sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar Rp. 41.415.463.468,- (Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), atau sebesar 82,81%.

2.1.1 Capaian Keberhasilan Program

Pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu tahun 2024 secara umum berhasil dengan rata-rata persentase capaian program 105.67%. Di bawah ini tabel capaian keberhasilan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung.

Tabel 1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			% Kinerja	% Keuangan
		K	RP		K	RP			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
KEPEGAWAIAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Kategori Nilai Akip Perangkat Daerah	79	Poin	Rp26.911.721.418,00	84,65	Poin	Rp22.522.335.513,00	107,15%	83,69%
	- Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	93	Persen		97,18	Persen		104,49%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100	Persen	Rp20.908.700,00	100,00%	Persen	Rp20.834.200,00	100,00%	99,64%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	Rp4.908.700,00	4	Dokumen	Rp4.908.700,00	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	Rp2.000.000,00	2	Dokumen	Rp1.995.700,00	100,00%	99,79%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	Rp2.000.000,00	2	Dokumen	Rp1.994.000,00	100,00%	99,70%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	Rp3.000.000,00	2	Dokumen	Rp2.981.800,00	100,00%	99,39%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	Rp3.000.000,00	2	Dokumen	Rp2.982.000,00	100,00%	99,40%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Rp2.000.000,00	1	Laporan	Rp1.995.200,00	100,00%	99,76%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	Rp4.000.000,00	7	Laporan	Rp3.976.800,00	100,00%	99,42%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100	Persen	Rp24.957.556.264,00	97,44%	Persen	Rp20.984.382.568,00	97,44%	84,08%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang/bulan	Rp27.435.109.464,00	60	Orang/bulan	Rp20.961.944.768,00	92,31%	76,41%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Rp9.136.000,00	1	Laporan	Rp9.129.200,00	100,00%	99,93%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			% Kinerja	% Keuangan
		K		RP	K		RP		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	Laporan	Rp13.310.800,00	8	Laporan	Rp13.308.600,00	100,00%	99,98%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis	0	Persen	Rp0,00	0,00%	Persen	Rp0,00	0,00%	0,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	Rp0,00	0	Orang	Rp0,00	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	Rp0,00	0	Orang	Rp0,00	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100	Persen	Rp475.858.554,00	113,76%	Persen	Rp424.668.736,00	113,76%	89,24%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp15.000.000,00	1	Paket	Rp14.705.100,00	100,00%	98,03%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	Rp73.200.000,00	2	Paket	Rp72.083.200,00	100,00%	98,47%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp43.000.000,00	1	Paket	Rp42.505.900,00	100,00%	98,85%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp103.658.554,00	1	Paket	Rp96.731.912,00	100,00%	93,32%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	Rp11.000.000,00	3	Dokumen	Rp10.120.000,00	100,00%	92,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	Rp15.000.000,00	12	Laporan	Rp14.980.000,00	100,00%	99,87%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164	Laporan	Rp215.000.000,00	322	Laporan	Rp173.542.624,00	196,34%	80,72%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100	Persen	Rp43.078.300,00	120,00%	Persen	Rp38.841.000,00	120,00%	90,16%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	Rp43.078.300,00	6	Unit	Rp38.841.000,00	120,00%	90,16%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	Persen	Rp966.350.600,00	100,26%	Persen	Rp821.937.354,00	100,26%	85,06%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9000	Laporan	Rp12.000.000,00	9070	Laporan	Rp9.750.000,00	100,78%	81,25%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Rp100.000.000,00	12	Laporan	Rp38.978.074,00	100,00%	38,98%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			% Kinerja	% Keuangan
		K		RP	K		RP		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Laporan	Rp0,00	0	Laporan	Rp0,00	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Rp854.350.600,00	12	Laporan	Rp773.209.280,00	100,00%	90,50%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	93%	Persen	Rp447.969.000,00	97,18%	Persen	Rp231.671.655,00	104,49%	51,72%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	Unit	Rp0,00	0	Unit	Rp0,00	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	Unit	Rp202.969.000,00	21	Unit	Rp187.428.655,00	100,00%	92,34%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27	Unit	Rp40.000.000,00	27	Unit	Rp39.293.000,00	100,00%	98,23%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp200.000.000,00	0	Unit	Rp0,00	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp5.000.000,00	1	Unit	Rp4.950.000,00	100,00%	99,00%
Penataan Organisasi	Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasi	0	Persen	Rp0,00	0,00%	Persen	Rp0,00	0,00%	0,00%
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0	Dokumen	Rp0,00	0	Dokumen	Rp0,00	0,00%	0,00%
JUMLAH 1				Rp26.911.721.418,00			Rp22.522.335.513,00	107,15%	83,69%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rata-rata persentase manajemen layanan ASN	87	Persen	Rp11.554.148.660,00	127,26%	Persen	Rp7.499.019.895,00	127,26%	64,90%
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	Persen	Rp9.039.886.946,00	100,01%	Persen	Rp5.282.179.203,00	100,01%	58,43%
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	Dokumen	Rp28.211.454,00	1	Dokumen	Rp27.445.500,00	100,00%	97,28%
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	Rp48.750.000,00	1	Dokumen	Rp38.060.500,00	100,00%	78,07%
Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen	Rp8.318.034.000,00	2	Dokumen	Rp4.682.245.320,00	100,00%	56,29%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			% Kinerja	% Keuangan
		K	RP		K	RP			
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1	Laporan	Rp15.000.000,00	1	Laporan	Rp9.088.500,00	100,00%	60,59%
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1200	Dokumen	Rp94.840.000,00	1073	Dokumen	Rp71.800.000,00	89,42%	75,71%
Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1	Dokumen	Rp60.000.000,00	1	Dokumen	Rp44.865.900,00	100,00%	74,78%
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2	Lembaga	Rp200.000.000,00	2	Lembaga	Rp153.830.200,00	100,00%	76,92%
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	Rp239.051.492,00	1	Dokumen	Rp223.161.283,00	100,00%	93,35%
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5000	Dokumen	Rp18.000.000,00	5533	Dokumen	Rp18.000.000,00	110,66%	100,00%
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	Rp18.000.000,00	1	Laporan	Rp13.682.000,00	100,00%	76,01%
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi	90	Persen	Rp942.500.000,00	198,13%	Persen	Rp794.057.120,00	198,13%	84,25%
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	40	Dokumen	Rp152.500.000,00	128	Dokumen	Rp128.482.000,00	320,00%	84,25%
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1750	Dokumen	Rp210.000.000,00	2177	Dokumen	Rp198.437.120,00	124,40%	94,49%
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	Dokumen	Rp580.000.000,00	3	Dokumen	Rp467.138.000,00	150,00%	80,54%
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN	100	Persen	Rp1.134.641.000,00	113,40%	Persen	Rp1.041.885.072,00	113,40%	91,83%
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	251	Dokumen	Rp493.241.000,00	173	Dokumen	Rp465.624.222,00	68,92%	94,40%
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	300	Orang	Rp470.970.000,00	344	Orang	Rp429.158.000,00	114,67%	91,12%
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0	Dokumen	Rp0,00	0	Dokumen	Rp0,00	0,00%	0,00%
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	40	Orang	Rp100.000.000,00	40	Orang	Rp80.152.000,00	100,00%	80,15%
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	40	Orang	Rp70.430.000,00	68	Orang	Rp66.950.850,00	170,00%	95,06%
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN Yang Berkinerja Baik	95	Persen	Rp437.120.714,00	97,50%	Persen	Rp380.898.500,00	97,50%	87,14%
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	Rp61.730.000,00	1	Dokumen	Rp45.773.000,00	100,00%	74,15%
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	Dokumen	Rp178.500.000,00	2	Dokumen	Rp154.084.700,00	100,00%	86,32%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			% Kinerja	% Keuangan
		K		RP	K		RP		
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0	Laporan	Rp0,00	0	Laporan	Rp0,00	0,00%	0,00%
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	0	Orang	Rp0,00	0	Orang	Rp0,00	0,00%	0,00%
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	326	Orang	Rp8.776.000,00	326	Orang	Rp8.140.000,00	100,00%	92,75%
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	40	Orang	Rp40.000.000,00	13	Orang	Rp37.378.000,00	32,50%	93,45%
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	Laporan	Rp101.149.500,00	20	Laporan	Rp90.106.400,00	100,00%	89,08%
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	40	Dokumen	Rp31.965.214,00	60	Dokumen	Rp31.949.600,00	150,00%	99,95%
Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1	Laporan	Rp15.000.000,00	1	Laporan	Rp13.466.800,00	100,00%	89,78%
JUMLAH 2				Rp11.554.148.660,00			Rp7.499.019.895,00	127,26%	64,90%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	79%	Persen	Rp11.548.616.500,00	82,59%	Persen	Rp11.394.108.060,00	82,59%	98,66%
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memenuhi Standar Kompetensi Teknis	3%	Persen	Rp950.460.000,00	2,87%	Persen	Rp904.666.500,00	95,54%	95,18%
Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	Dokumen	Rp135.000.000,00	1	Dokumen	Rp113.738.500,00	100,00%	84,25%
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1870	Orang	Rp780.460.000,00	1620	Orang	Rp760.050.000,00	86,63%	97,38%
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	1	Dokumen	Rp35.000.000,00	1	Dokumen	Rp30.878.000,00	100,00%	88,22%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			% Kinerja	% Keuangan
		K		RP	K		RP		
Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3%	Persen	Rp10.598.156.500,00	4,15%	Persen	Rp10.489.441.560,00	138,25%	98,97%
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1	Dokumen	Rp98.040.000,00	1	Dokumen	Rp97.109.000,00	100,00%	99,05%
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2108	Laporan	Rp10.470.116.500,00	4527	Laporan	Rp10.364.694.360,00	214,75%	98,99%
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1	Dokumen	Rp30.000.000,00	1	Dokumen	Rp27.638.200,00	100,00%	92,13%
JUMLAH 3				Rp11.548.616.500,00			Rp11.394.108.060,00	82,59%	98,66%
JUMLAH TOTAL				Rp50.014.486.578,00			Rp41.415.463.468,00	105,67%	82,81%

Walaupun secara umum capaian rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dinyatakan berhasil namun masih ada kegiatan yang capaian kinerjanya masih di bawah target. Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a) Adanya Perubahan Parsial yang menghambat terhadap proses pencairan;
 - b) Masih adanya kekurangan pahaman pengelola keuangan dalam pengoperasian SIPD.
2. PROGRAM PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN
 - a) Seleksi pengadaan ASN masih menunggu peraturan dan jadwal dari Pusat;
 - b) Adanya peraturan yang berubah sehingga perlu kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan;
 - c) Adanya runtutan kegiatan yang tergantung dengan sistem periodesasi dan penjadwalan dari Instansi Vertikal; dan
 - d) Masih adanya pegawai dilingkungan Pemkab Bandung yang kurang memahami dalam menggunakan Aplikasi Kepegawaian.
3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 - a) Adanya penyesuaian jadwal pengiriman diklat dengan jadwal dari Lembaga Penyelenggara Diklat; dan
 - b) Jadwal Pendidikan dan Pelatihan yang dikeluarkan oleh penyelenggaran kurang sesuai dengan Anggaran Kas.

2.1.2 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKPSDM selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka beeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.1.3. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan, Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM Sampai dengan 2024 diuraikan dalam tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM (TC.29.)

Kode Rekening						Uraian	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024						Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025						
											Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)		Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
1						2	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11				
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
									Nilai AKIP BKPSDM		80,50	Point	81,25	Point	79	Point	84,65	Point	107,15%	82,00	Point	84,70	Point	103%	
									Persentase Aset Dalam Konisi Baik		95%		92%		93%		97,18%		104,49%		94%		81%		81%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%		100%		100%		100%		100%		100%		83%		83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		24	dokumen	12	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100%	4	dokumen	20	dokumen	83%	
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		6	dokumen	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	5	dokumen	83%	
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		6	dokumen	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	5	dokumen	83%	
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		6	dokumen	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	5	dokumen	83%	
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		6	dokumen	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	5	dokumen	83%	
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6	dokumen	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	5	dokumen	83%	
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		42	Laporan	21	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100%	7	Laporan	35	Laporan	83%	
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%				100%		97,44%		97,44%		100%		82%		82%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		325	Orang	130	Orang	65	Orang	60	Orang	92,31%	63	Orang	253	Orang	78%	
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		6	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	5	Laporan	83%	
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		48	Laporan	24	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100%	8	Laporan	40	Laporan	83%	
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%				0%		0%		0%		100%		69%		69%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,05	10	Pengadaan Pakaian Dinas		2	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	1	Paket	1	Paket	50%	
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		485	Orang	264	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	70	Orang	334	Orang	69%	

Kode Rekening						Uraian	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024				Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025								
											Target		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)					
1						2	4		5		6		7	8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11					
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan		44	Orang		0	Orang	0	Orang	0%	0	Orang	0	Orang	0%		
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%				100%		114%		113,76%	100%		112%		112%	
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6	Paket		3	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	5	Paket	83%		
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	Paket		5	Paket	2	Paket	100%	2	Paket	9	Paket	75%		
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6	Paket		3	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	5	Paket	83%		
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		6	Paket		3	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	5	Paket	83%		
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		18	Dokumen		9	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	15	Dokumen	83%		
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		72	Laporan		36	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	60	Laporan	83%		
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		450	Laporan		911	Laporan	164	Laporan	322	Laporan	196%	75	Laporan	1308	Laporan	291%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%				100%		120%		120%	100%		61%		61%	
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1	Unit		1	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	1	Unit	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0	0 Unit		0	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0%	0	Unit	0	0 Unit	0%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,07	3	Pengadaan Mebel		0	0 Unit		0	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0%	0	Unit	0	0 Unit	0%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,07	4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		150	Unit		23	Unit	5	Unit	6	Unit	120%	4	Unit	33	Unit	22%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%				100%		100%		100,3%	100%		65%		65%	
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		54.000	Laporan		27531	Laporan	9.000	Laporan	9.070	Laporan	101%	9.000	Laporan	45.601	Laporan	84%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		66	Laporan		36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	60	Laporan	91%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	Laporan		0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	0	Laporan	0	Laporan	0%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		72	Laporan		36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	60	Laporan	83%

Kode Rekening						Uraian	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024						Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025					
											Target		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
1						2	4		5		6		7	8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11				
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95%				93%		97,18%		104,49%	94%		74%		74%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1	unit	1	unit	0	unit	0	unit	0%	0	unit	1	unit	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		142	Unit	73	Unit	23	Unit	21	Unit	91%	23	Unit	117	Unit	82%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		162	Unit	81	Unit	27	Unit	27	Unit	100%	27	Unit	135	Unit	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		6	Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	1	Unit	17%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		17	Unit	13	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	15	Unit	88%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,13	0	Penataan Organisasi		100%				0%		0%		0%	0%		100%		100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				1	2,13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		2	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	2	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				2	0	0	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		100%				87%		127%		127,26%	90%		136%		136%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				2	2,01	0	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		100%				100%		100,01%		100,01%	100%		84%		84%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				2	2,01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				2	2,01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				2	2,01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		12	Dokumen	6	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	10	Dokumen	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				2	2,01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		6	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	5	Laporan	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				2	2,01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		7.200	Dokumen	3.908	Dokumen	1.200	Dokumen	1.073	Dokumen	89%	1.200	Dokumen	6.181	Dokumen	86%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00				2	2,01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN		6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%

Kode Rekening							Uraian		Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024					Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025											
													Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)		Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)								
1							2		4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11								
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		12	Lembaga		6	Lembaga		2	Lembaga		100%	2	Lembaga		10	Lembaga		83%			
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		6	Dokumen		3	Dokumen		1	Dokumen		100%	1	Dokumen		5	Dokumen		83%			
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian		30.000	Dokumen		15.347	Dokumen		5.000	Dokumen		111%	5.000	Dokumen		25.880	Dokumen		86%			
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		6	Laporan		3	Laporan		1	Laporan		100%	1	Laporan		5	Laporan		83%			
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,02	0	Mutasi dan Promosi ASN		90%				90%		198%		198%		90%		101%		101%					
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,02	1	Pengelolaan Mutasi ASN		240	Dokumen		124	Dokumen		40	Dokumen		128	Dokumen		320%	40	Dokumen		292	Dokumen		122%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		10.500	Dokumen		5.425	Dokumen		1.750	Dokumen		2.177	Dokumen		124%	1.750	Dokumen		9.352	Dokumen		89%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,02	3	Pengelolaan Promosi ASN		12	Dokumen		6	Dokumen		2	Dokumen		3	Dokumen		150%	2	Dokumen		11	Dokumen		92%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,03	0	Pengembangan Kompetensi ASN		100%				100%		113%		113,40%		100%		249%		249%					
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,03	2	Pengelolaan Assessment Center		600	Dokumen		2517	Dokumen		251	Dokumen		173	Dokumen		69%	100	Dokumen		2.790	Dokumen		465%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		2.000	Orang		1451	Orang		300	Orang		344	Orang		115%	300	Orang		2.095	Orang		105%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		1	Dokumen		1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		0%	0	Dokumen		1	Dokumen		100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		240	Orang		894	Orang		40	Orang		40	Orang		100%	40	Orang		974	Orang		406%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		240	Orang		303	Orang		40	Orang		68	Orang		170%	40	Orang		411	Orang		171%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,04	0	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		95%				95%		98%		97,50%		95%		112%		112%					
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1	Dokumen		2	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		100%	1	Dokumen		4	Dokumen		400%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		10	Dokumen		4	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		100%	2	Dokumen		8	Dokumen		80%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1	Laporan		1	Laporan		0	Laporan		0	Laporan		0%	0	Laporan		1	Laporan		100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		36	Orang		6	Orang		6	Orang		0	Orang		0%	6	Orang		12	Orang		33%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		1.956	Orang		1098	Orang		326	Orang		326	Orang		100%	326	Orang		1750	Orang		89%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,04	7	Pembinaan Disiplin ASN		240	Orang		130	Orang		40	Orang		13	Orang		33%	40	Orang		183	Orang		76%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		120	Laporan		32	Laporan		20	Laporan		20	Laporan		100%	20	Laporan		72	Laporan		60%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		240	Laporan		102	Laporan		40	Laporan		60	Laporan		150%	40	Dokumen		202	Dokumen		84%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00					2	2,04	10	Evaluasi Disiplin ASN		6	Laporan		3	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		100%	1	Laporan		5	Laporan		83%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00					0	0	0	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					0																

Kode Rekening						Uraian	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024					Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025				
											Target		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)		
1						2	4		5		6		7	8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11		
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00		2	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		85,08%		79%		82,59%		82,59%	82,08%		270,76%		271%		
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00		2	2,01	0	Pengembangan Kompetensi Teknis		18%		3%		2,87%		95,54%	3%		6%		215%		
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00		2	2,01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00		2	2,01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		553	Orang	923	Orang	1870	Orang	1620	Orang	87%	100	Orang	2643	Orang	478%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00		2	2,01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00		2	2,02	0	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		18%		3%		4,15%		138,25%	3%		9%		301%		
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00		2	2,02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional		6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%

Kode Rekening						Uraian	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024					Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025						
											Target		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
1						2	4		5		6		7	8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11				
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00				2	2,02	2	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		200	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	100	Orang	100	Dokumen	50%		
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00				2	2,02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		889	Orang	4157	Orang	2108	Orang	4.527	Orang	215%	100	Orang	8.784	Orang	988%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00				2	2,02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00				2	2,03	0	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri		0,09%				0,09%		0,00%		0	0,09%		0,045%		50%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00				2	2,03	2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri		30	Orang	0	Orang	15	Orang	0	Orang	0%	15	Orang	15	Dokumen	50%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar II.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM 2025



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan

kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, Visi dan Misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Secara lebih jelas dapat diuraikan melalui pencapaian hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3 Analisa Capaian Kinerja BKPSDM Sampai Tahun 2024 (T-C.30.)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Renstra Pada Tahun Ke-						Realisasi Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				Rasio				Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal BKPSDM.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik.	Nilai AKIP BKPSDM	Poin	76,5	77	78	79	82	82.25	78,6	81,25	81,70	84,65	102,75%	105,52%	104,74%	107,15%	82	
		Prosentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	90	91	92	93	94	95	85	90,53	96,96	97,18	94,44%	99,48%	105,39%	104,49%	94	
Terwujudnya sumber daya aparatur yang Profesional, kompeten dan berkinerja.	Meningkatnya Profesionalitas ASN.	Nilai Index Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara	Poin	67,1	71	73,08	76,08	79,08	82,08	71	71,06	73,81	76,76	105,81%	100,08%	101,00%	100,89%	79.6	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah memproses administrasi kepegawaian di daerah. Pelayanan kepegawaian mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi. Dalam penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang harus tetap diperhatikan untuk mengantisipasi dampak yang terjadi dalam mendukung visi dan misi. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, adalah:

- 1 Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 2 Masih perlunya mensosialisasikannya PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN dan peraturan-peraturan mengenai kepegawaian lainnya;
- 3 Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan
- 4 Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama di kewilayahan yang disebabkan belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang merupakan kewenangan PD lain
- 5 Adanya PNS yang terlibat masalah hukum
- 6 Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa SKPD
- 7 Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu
- 8 Belum akuratnya seluruh data pegawai
- 9 Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi berdasarkan *road map* reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Bandung bidang SDM aparatur, meliputi:
 - a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan *minus growth* (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun serta Monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNS)

- b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan
- c. Penyelenggaraan *Assesment* yang memiliki fungsi dalam menyusun berbagai dokumen acuan bagi pengembangan pegawai, di antaranya dalam penyusunan:
 - dokumen standar kompetensi manajerial
 - dokumen standar kompetensi bidang
 - metoda/alat ukur penilaian kompetensi calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan
 - kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
 - bussines process MSDM berbasis kompetensi dan peninjauan SOP Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung berdasarkan RKPD. Review terhadap RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD (T-C.31)

KODE					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Usuran	Bid. Usuran	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	
5	3	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDM Kabupaten Bandung	- Nilai Sakip Perangkat Daerah - Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	82 94	Poin Persen	Rp 31.220.216.925,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDM Kabupaten Bandung	- Nilai Sakip Perangkat Daerah - Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	84.70 94	Poin Persen	Rp 28.807.847.366,49	
5	3	1	2,01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	Persen	Rp 39.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	Persen	Rp 64.886.817,90	
5	3	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	Rp 8.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	Rp 18.650.000,00	
5	3	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	Rp 3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	Rp 6.844.600,00	
5	3	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2	Dokumen	Rp 3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2	Dokumen	Rp 12.720.000,00	
5	3	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	Rp 5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	Rp 3.720.000,00	
5	3	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	Rp 5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	Rp 3.720.000,00	
5	3	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Rp 3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Rp 1.720.000,00	
5	3	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	Rp 10.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	Rp 17.232.217,90	

KODE					Rancangan Awal						Hasil Analis Kebutuhan							Catatan Penting		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					-2	-3	-4		-5		-6	-7		-8	-9		-10		-11	-12
5	3	1	2,01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata		1	Dokumen	Rp 1.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata		1	Dokumen	Rp 140.000,00		
5	3	1	2,01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		70	Data	Rp 1.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		70	Data	Rp 140.000,00		
5	3	1	2,02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		100	Persen	Rp 29.139.446.325,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		100	Persen	Rp 26.944.051.733,59		
5	3	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		65	Orang/bulan	Rp 29.104.446.325,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		65	Orang/bulan	Rp 26.924.101.733,59		
5	3	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Laporan	Rp 15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Laporan	Rp 8.550.000,00		
5	3	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		8	Laporan	Rp 20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		8	Laporan	Rp 11.400.000,00		
5	3	1	2,05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis		100	Persen	Rp 90.380.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis		100	Persen	Rp 5.392.700,00		
5	3	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1	Paket	Rp 5.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1	Paket	Rp 5.000.000,00		
5	3	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		70	Orang	Rp 85.380.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0	Orang	Rp 392.700,00		
5	3	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	Orang	Rp -	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	Orang	Rp -		
5	3	1	2,06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Persentase ketersediaan operasional perkantoran		100	Persen	Rp 364.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Persentase ketersediaan operasional perkantoran		100	Persen	Rp 347.548.650,00		

KODE					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	
5	3	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 15.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 15.000.000,00	
5	3	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	Rp 50.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	Rp 116.973.600,00	
5	3	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	Rp 33.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	Rp 41.516.500,00	
5	3	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	Rp 90.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	Rp 32.418.800,00	
5	3	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	Rp 11.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	Rp 11.000.000,00	
5	3	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	Rp 15.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	Rp 8.900.000,00	
5	3	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Laporan	Rp 150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177	Laporan	Rp 121.739.750,00	
5	3	1	2,07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100	Persen	Rp 205.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100	Persen	Rp 111.430.000,00	
5	3	1	2,07	6	Pengadaan Mebel	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Pengadaan mebel yang dibeli	4	Unit	Rp 180.000.000,00	Pengadaan Mebel	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Pengadaan mebel yang dibeli	0	Unit	Rp -	
5	3	1	2,07	5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	Rp 25.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	Rp 111.430.000,00	
5	3	1	2,08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 1.087.390.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 1.083.267.465,00	
5	3	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9000	Laporan	Rp 40.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9000	Laporan	Rp 12.100.000,00	
5	3	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Rp 120.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Rp 19.997.325,00	

KODE					Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					-2	-3	-4		-5		-6	-7	-8	-9		-10		-11	-12
5	3	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	Laporan	Rp -	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	Laporan	Rp -	
5	3	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	bulan	Rp 927.390.600,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	Laporan	Rp 1.051.170.140,00	
5	3	1	2,09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Persentase aset dalam kondisi baik		94	Persen	Rp 295.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	Persentase aset dalam kondisi baik		94	Persen	Rp 251.270.000,00	
5	3	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0	Unit	Rp -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0	Unit	Rp -	
5	3	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		23	Unit	Rp 250.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		23	Unit	Rp 211.270.000,00	
5	3	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		27	Unit	Rp 40.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		27	Unit	Rp 40.000.000,00	
5	3	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	Gedung	Rp -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	Gedung	Rp -	
5	3	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	Rp 5.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	Unit	Rp -	
5	3	1	2,13	0	Penataan Organisasi	BKPSDM Kabupaten Bandung	Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasi		0	Persen	Rp -	Penataan Organisasi	BKPSDM Kabupaten Bandung	Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasi		0	Persen	Rp -	
5	3	1	2,13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		0	Dokumen		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	BKPSDM Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		0	Dokumen		
Jumlah 1											Rp 31.220.216.925,00	Jumlah 1						Rp 28.807.847.366,49	
5	3	2	0	0	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kabupaten Bandung	Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN		87	Persen	Rp 4.522.606.000,00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kabupaten Bandung	Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN		87	Persen	Rp 4.621.176.938,00	

KODE					Rancangan Awal						Hasil Analis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	
5	3	2	2,01	0	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kabupaten Bandung	Presentase Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	Persen	Rp 2.527.600.000,00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kabupaten Bandung	Presentase Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	Persen	Rp 2.988.249.388,00	
5	3	2	2,01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	Dokumen	Rp 35.000.000,00	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	Dokumen	Rp 17.589.000,00	
5	3	2	2,01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	Rp 48.750.000,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	Rp 19.882.000,00	
5	3	2	2,01	3	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen	Rp 1.838.850.000,00	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen	Rp 2.254.731.980,00	
5	3	2	2,01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1	Laporan	Rp 15.000.000,00	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1	Laporan	Rp 5.518.263,00	
5	3	2	2,01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1200	Dokumen	Rp 100.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1200	Dokumen	Rp 108.452.200,00	
5	3	2	2,01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1	Dokumen	Rp 50.000.000,00	Evaluasi Pemberhentian ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1	Dokumen	Rp 38.931.000,00	
5	3	2	2,01	8	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2	Lembaga	Rp 100.000.000,00	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2	Lembaga	Rp 249.840.000,00	
5	3	2	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	Rp 300.000.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	Rp 272.704.945,00	
5	3	2	2,01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5000	Dokumen	Rp 20.000.000,00	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5000	Dokumen	Rp 14.400.000,00	
5	3	2	2,01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	Rp 20.000.000,00	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	Rp 6.200.000,00	
5	3	2	2,02	0	Mutasi dan Promosi ASN	Kabupaten Bandung	Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi	90	Persen	Rp 710.000.000,00	Mutasi dan Promosi ASN	Kabupaten Bandung	Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi	90	Persen	Rp 305.632.800,00	
5	3	2	2,02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	40	Dokumen	Rp 170.000.000,00	Pengelolaan Mutasi ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	40	Dokumen	Rp 58.644.500,00	

KODE					Rancangan Awal					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
5	3	2	2,02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1750 Dokumen	Rp 140.000.000,00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1750 Dokumen	Rp 41.546.000,00	
5	3	2	2,02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	Rp 400.000.000,00	Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	Rp 205.442.300,00	
5	3	2	2,03	0	Pengembangan Kompetensi ASN	Kabupaten Bandung	Persentase Fasilitas Pengembangan ASN	100 Persen	Rp 725.000.000,00	Pengembangan Kompetensi ASN	Kabupaten Bandung	Persentase Fasilitas Pengembangan ASN	100 Persen	Rp 962.530.750,00	
5	3	2	2,03	2	Pengelolaan Assessment Center	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	100 Dokumen	Rp 200.000.000,00	Pengelolaan Assessment Center	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	500 Dokumen	Rp 658.990.000,00	
5	3	2	2,03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	100 Orang	Rp 350.000.000,00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	100 Orang	Rp 198.449.000,00	
5	3	2	2,03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0 Dokumen	Rp -	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0 Dokumen	Rp -	
5	3	2	2,03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	40 Orang	Rp 100.000.000,00	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	40 Orang	Rp 56.257.500,00	
5	3	2	2,03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kabupaten Bandung	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	8 Orang	Rp 75.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kabupaten Bandung	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	8 Orang	Rp 48.834.250,00	
5	3	2	2,04	0	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Bandung	Persentase ASN Yang Berkinerja Baik	95 Persen	Rp 560.006.000,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Bandung	Persentase ASN Yang Berkinerja Baik	95 Persen	Rp 364.764.000,00	
5	3	2	2,04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Rp 61.730.000,00	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Rp 27.445.000,00	
5	3	2	2,04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	Rp 103.500.000,00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	Rp 65.859.000,00	
5	3	2	2,04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Dokumen	Rp -	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Dokumen	Rp -	
5	3	2	2,04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kabupaten Bandung	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 Orang	Rp 211.000.000,00	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kabupaten Bandung	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 Orang	Rp 149.240.000,00	
5	3	2	2,04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kabupaten Bandung	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	326 Orang	Rp 8.776.000,00	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kabupaten Bandung	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	326 Orang	Rp 2.990.500,00	
5	3	2	2,04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	40 Orang	Rp 40.000.000,00	Pembinaan Disiplin ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	40 Orang	Rp 40.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal						Hasil Analis Kebutuhan						Catatan Penting
Urutan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	
5	3	2	2,04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	Laporan	Rp 80.000.000,00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	Laporan	Rp 35.279.500,00	
5	3	2	2,04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	40	Dokumen	Rp 40.000.000,00	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	40	Dokumen	Rp 28.950.000,00	
5	3	2	2,04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1	Laporan	Rp 15.000.000,00	Evaluasi Disiplin ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1	Laporan	Rp 15.000.000,00	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						Kabupaten Bandung				Rp 5.771.813.400,00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kabupaten Bandung				Rp 6.012.068.900,00	
5	4	2	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Bandung	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	82	Persen	Rp 5.771.813.400,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Bandung	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	82	Persen	Rp 6.012.068.900,00	
5	4	2	2,01	0	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kabupaten Bandung	Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi	3	Persen	Rp 1.100.000.000,00	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kabupaten Bandung	Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi	3	Persen	Rp 961.586.000,00	
5	4	2	2,01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Bandung	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1	Dokumen	Rp 35.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Bandung	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1	Dokumen	Rp 113.701.000,00	
5	4	2	2,01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Bandung	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100	Orang	Rp 1.030.000.000,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Bandung	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	399	Orang	Rp 830.705.000,00	

KODE					Rancangan Awal					Hasil Analis Kebutuhan							Catatan Penting		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1					-2	-3	-4		-5	-6	-7	-8	-9		-10	-11	-12		
5	4	2	2,01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi		1	Dokumen	Rp 35.000.000,00	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi		1	Dokumen	Rp 17.180.000,00	
5	4	2	2,02	0	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kabupaten Bandung	Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		3	Persen	Rp 4.671.813.400,00	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kabupaten Bandung	Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		3	Persen	Rp 5.050.482.900,00	
5	4	2	2,02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertjabatan Fungsional	Kabupaten Bandung	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun		1	Dokumen	Rp 5.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	Kabupaten Bandung	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun		1	Dokumen	Rp 3.710.000,00	
5	4	2	2,02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi		100	Orang	Rp 100.000.000,00	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi		100	Orang	Rp 79.680.000,00	
5	4	2	2,02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		100	Laporan	Rp 4.536.813.400,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		1195	Laporan	Rp 4.960.042.900,00	

KODE					Rancangan Awal					Hasil Analis Kebutuhan							Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12		
5	4	2	2,02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1	Dokumen	Rp 30.000.000,00	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1	Dokumen	Rp 7.050.000,00	
5	4	2	02:03	0	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Kabupaten Bandung	Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	0,00	Persen	Rp -	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Kabupaten Bandung	Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	0,00	Persen	Rp -	
5	4	2	02:03	2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Kabupaten Bandung	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	0	Orang	Rp -	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Kabupaten Bandung	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	0	Orang	Rp -	
					Jumlah 2					Rp 10.294.419.400,00	Jumlah 2					Rp 10.633.245.838,00	
Jumlah Total										Rp 41.514.636.325,00	Jumlah Total					Rp 39.441.093.204,49	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Bandung sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menata ulang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan pada Pemerintah Daerah bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yaitu dengan peningkatan kualitas pelayanan pegawai di lingkup BKPSDM berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan baik kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun kepada masyarakat diharapkan agar indikator meningkatnya kepuasan masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menurunnya kasus pengaduan terhadap pelayanan pemerintah dapat dicapai, diwujudkan melalui peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, maupun program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025

Dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati Bandung, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai dengan misi ke 3 Bupati Bandung yaitu **“Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”**, dimana tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung yang di integrasikan dengan visi dan misi Bupati Bandung dan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 adalah **“Terwujudnya Profesionalitas dan meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN’**. Setelah dilakukan kajian internal maka sasaran dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung adalah **“Terwujudnya Profesionalitas ASN dan Meningkatnya Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi”**.

Setelah dilaksanakan kajian internal terhadap sasaran dan indikator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung, selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka di tetapkan tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut :

Tabel 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPSDM 2025 - 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Terwujudnya Profesionalitas dan meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN	Terwujudnya Profesionalitas ASN	Indeks RB General	Poin	80,29	80,5	80,8	81,1	81,4	81,7	82
			Nilai Maturitas Manajemen Risiko BKPSDM	%	63,51%	63,60%	63,70%	63,80%	63,90%	64,00%	64,00%
			Indeks Profesionalitas ASN	Point	84,65	84,85	85,05	85,25	85,45	85,65	85,85
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Point	28,77	28,9	29	29,1	29,2	29,3	29,4

Upaya perencanaan tujuan dan sasaran merupakan faktor teenting dalam peoses perencanaan strategis, untuk mencapai tujuan dan sasaran BKPSDM menjabarkan dalam kebijakan program dan kegiatan, untuk mencapai strategi BKPSDM selama kurun waktu 2025 s/d 2029.

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan meningkatkan

kualitas sumber daya aparatur di Pemerintah Kabupaten Bandung, maka program dan kegiatan didasarkan pada 2 (dua) unsur yaitu unsur Internal dan Eksternal.

**Tabel 6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM
Tahun 2025**

Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5	3	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai Sakip Perangkat Daerah
						- Presentase Aset Dalam Kondisi Baik
5	3	1	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	3	1	2.01	8	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata
5	3	1	2.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
5	3	1	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5	3	1	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis
5	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5	3	1	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	3	1	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
5	3	1	2.07	8	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel yang dibeli
5	3	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
5	3	1	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5	3	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5	3	1	2.13	0	Penataan Organisasi	Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasi
5	3	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
5	3	2	0	0	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN
5	3	2	2.01	0	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
5	3	2	2.01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
5	3	2	2.01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
5	3	2	2.02	0	Mutasi dan Promosi ASN	Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi

Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
5	3	2	2.03	0	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
5	3	2	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
5	3	2	2.04	0	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN Yang Berkinerja Baik
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani
5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN
5	4	0	0	0	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5	4	2	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN
5	4	2	2.01	0	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi
5	4	2	2.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	4	2	2.02	0	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun

Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5	4	2	2.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5	4	2	2.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama
5	4	2	2.03	0	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
5	4	2	2.03	2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7, berikut :

Tabel 7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 (T-C.33)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	3	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai Sakip Perangkat Daerah - Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	BKPSDM Kabupaten Bandung	84.70 94	Poin Persen	Rp 28.807.847.366,49	APBD		81.30 95	Poin Persen	Rp 30.567.158.000,00
5	3	1	2,01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	BKPSDM Kabupaten Bandung	100	Persen	Rp 64.886.817,90	APBD		100	Persen	Rp 39.000.000,00
5	3	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	4	Dokumen	Rp 18.650.000,00	APBD		4	Dokumen	Rp 8.000.000,00
5	3	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	2	Dokumen	Rp 6.844.600,00	APBD		2	Dokumen	Rp 3.000.000,00
5	3	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	2	Dokumen	Rp 12.720.000,00	APBD		2	Dokumen	Rp 3.000.000,00
5	3	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	2	Dokumen	Rp 3.720.000,00	APBD		2	Dokumen	Rp 5.000.000,00
5	3	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	2	Dokumen	Rp 3.720.000,00	APBD		2	Dokumen	Rp 5.000.000,00
5	3	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	1	Laporan	Rp 1.720.000,00	APBD		1	Dokumen	Rp 3.000.000,00
5	3	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	7	Laporan	Rp 17.232.217,90	APBD		7	Dokumen	Rp 10.000.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	3	1	2,01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	BKPSDM Kabupaten Bandung	1	Dokumen	Rp 140.000,00	APBD	1	Laporan	Rp 1.000.000,00
5	3	1	2,01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	70	Data	Rp 140.000,00	APBD	93	Laporan	Rp 1.000.000,00
5	3	1	2,02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	BKPSDM Kabupaten Bandung	100	Persen	Rp 26.944.051.733,59	APBD	100	Persen	Rp 28.480.688.000,00
5	3	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kabupaten Bandung	65	Orang/bulan	Rp 26.924.101.733,59	APBD	65	Orang/bulan	Rp 28.445.688.000,00
5	3	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	1	Laporan	Rp 8.550.000,00	APBD	1	Laporan	Rp 15.000.000,00
5	3	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	8	Laporan	Rp 11.400.000,00	APBD	8	Laporan	Rp 20.000.000,00
5	3	1	2,05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis	BKPSDM Kabupaten Bandung	100	Persen	Rp 5.392.700,00	APBD	100	Persen	Rp 90.380.000,00
5	3	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BKPSDM Kabupaten Bandung	1	Paket	Rp 5.000.000,00	APBD	1	Paket	Rp 5.000.000,00
5	3	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kabupaten Bandung	0	Orang	Rp 392.700,00	APBD	70	Orang	Rp 85.380.000,00
5	3	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kabupaten Bandung	0	Orang	Rp -	APBD	0	Orang	
5	3	1	2,06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	BKPSDM Kabupaten Bandung	100	Persen	Rp 347.548.650,00	APBD	100	Persen	Rp 461.000.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	3	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	1	Paket	Rp 15.000.000,00	APBD		1	Paket	Rp 15.000.000,00
5	3	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	4	Paket	Rp 116.973.600,00	APBD		2	Paket	Rp 120.000.000,00
5	3	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	12	Paket	Rp 41.516.500,00	APBD		1	Paket	Rp 20.000.000,00
5	3	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	2	Paket	Rp 32.418.800,00	APBD		1	Paket	Rp 90.000.000,00
5	3	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	3	Dokumen	Rp 11.000.000,00	APBD		3	Dokumen	Rp 11.000.000,00
5	3	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kabupaten Bandung	12	Laporan	Rp 8.900.000,00	APBD		12	Laporan	Rp 15.000.000,00
5	3	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	177	Laporan	Rp 121.739.750,00	APBD		75	Laporan	Rp 190.000.000,00
5	3	1	2,07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	100	Persen	Rp 111.430.000,00	APBD		100	Persen	Rp 85.000.000,00
5	3	1	2,07	6	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel yang dibeli	BKPSDM Kabupaten Bandung	0	Unit	Rp -	APBD		0	Unit	Rp -
5	3	1	2,07	5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	20	Unit	Rp 111.430.000,00	APBD		4	Unit	Rp 85.000.000,00
5	3	1	2,08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	100	Persen	Rp 1.083.267.465,00	APBD		100	Persen	Rp 1.136.090.000,00
5	3	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kabupaten Bandung	9000	Laporan	Rp 12.100.000,00	APBD		9000	Laporan	Rp 40.000.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	3	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	12	Laporan	Rp 19.997.325,00	APBD		12	Laporan	Rp 120.000.000,00
5	3	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	0	Laporan	Rp -	APBD		0	Laporan	
5	3	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	12	Laporan	Rp 1.051.170.140,00	APBD		12	Laporan	Rp 976.090.000,00
5	3	1	2,09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	BKPSDM Kabupaten Bandung	94	Persen	Rp 251.270.000,00	APBD		95	Persen	Rp 275.000.000,00
5	3	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKPSDM Kabupaten Bandung	0	Unit	Rp -	APBD		0	Unit	-
5	3	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BKPSDM Kabupaten Bandung	23	Unit	Rp 211.270.000,00	APBD		27	Unit	Rp 220.000.000,00
5	3	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKPSDM Kabupaten Bandung	27	Unit	Rp 40.000.000,00	APBD		27	Unit	Rp 40.000.000,00
5	3	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM Kabupaten Bandung	0	Gedung	Rp -	APBD		0	Unit	
5	3	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM Kabupaten Bandung	0	Unit	Rp -	APBD		1	Unit	Rp 15.000.000,00
5	3	1	2,13	0	Penataan Organisasi	Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasi	BKPSDM Kabupaten Bandung	0	Persen	Rp -	APBD		0	Persen	Rp -
5	3	1	2,13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	BKPSDM Kabupaten Bandung	0	Dokumen		APBD		0	Dokumen	
Jumlah 1										Rp 28.807.847.366,49					Rp 30.567.158.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
5	3	2	0	0	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN	Kabupaten Bandung	87	Persen	Rp 4.621.176.938,00	APBD		90	Persen	Rp 3.493.756.000,00
5	3	2	2,01	0	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kabupaten Bandung	100	Persen	Rp 2.988.249.388,00	APBD		100	Persen	Rp 1.498.750.000,00
5	3	2	2,01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kabupaten Bandung	1	Dokumen	Rp 17.589.000,00	APBD		1	Dokumen	Rp 35.000.000,00
5	3	2	2,01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Bandung	1	Dokumen	Rp 19.882.000,00	APBD		1	Dokumen	Rp 48.750.000,00
5	3	2	2,01	3	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Bandung	2	Dokumen	Rp 2.254.731.980,00	APBD		2	Dokumen	Rp 750.000.000,00
5	3	2	2,01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Kabupaten Bandung	1	Laporan	Rp 5.518.263,00	APBD		1	Laporan	Rp 15.000.000,00
5	3	2	2,01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Bandung	1200	Dokumen	Rp 108.452.200,00	APBD		1200	Dokumen	Rp 100.000.000,00
5	3	2	2,01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Kabupaten Bandung	1	Dokumen	Rp 38.931.000,00	APBD		1	Dokumen	Rp 60.000.000,00
5	3	2	2,01	8	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kabupaten Bandung	2	Lembaga	Rp 249.840.000,00	APBD		2	Lembaga	Rp 150.000.000,00
5	3	2	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Bandung	1	Dokumen	Rp 272.704.945,00	APBD		1	Dokumen	Rp 300.000.000,00
5	3	2	2,01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Bandung	5000	Dokumen	Rp 14.400.000,00	APBD		5000	Dokumen	Rp 20.000.000,00
5	3	2	2,01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Bandung	1	Laporan	Rp 6.200.000,00	APBD		1	Laporan	Rp 20.000.000,00
5	3	2	2,02	0	Mutasi dan Promosi ASN	Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi	Kabupaten Bandung	90	Persen	Rp 305.632.800,00	APBD		90	Persen	Rp 710.000.000,00
5	3	2	2,02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kabupaten Bandung	40	Dokumen	Rp 58.644.500,00	APBD		40	Dokumen	Rp 170.000.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	3	2	2,02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Bandung	1750	Dokumen	Rp 41.546.000,00	APBD		1750	Dokumen	Rp 140.000.000,00
5	3	2	2,02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Bandung	2	Dokumen	Rp 205.442.300,00	APBD		2	Dokumen	Rp 400.000.000,00
5	3	2	2,03	0	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN	Kabupaten Bandung	100	Persen	Rp 962.530.750,00	APBD		100	Persen	Rp 725.000.000,00
5	3	2	2,03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kabupaten Bandung	500	Dokumen	Rp 658.990.000,00	APBD		100	Dokumen	Rp 200.000.000,00
5	3	2	2,03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Kabupaten Bandung	100	Orang	Rp 198.449.000,00	APBD		100	Orang	Rp 350.000.000,00
5	3	2	2,03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kabupaten Bandung	0	Dokumen	Rp -	APBD		0	Dokumen	
5	3	2	2,03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Kabupaten Bandung	40	Orang	Rp 56.257.500,00	APBD		2	Orang	Rp 100.000.000,00
5	3	2	2,03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kabupaten Bandung	8	Orang	Rp 48.834.250,00	APBD		8	Orang	Rp 75.000.000,00
5	3	2	2,04	0	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN Yang Berkinerja Baik	Kabupaten Bandung	95	Persen	Rp 364.764.000,00	APBD		95	Persen	Rp 560.006.000,00
5	3	2	2,04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Bandung	1	Dokumen	Rp 27.445.000,00	APBD		1	Dokumen	Rp 61.730.000,00
5	3	2	2,04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Bandung	2	Dokumen	Rp 65.859.000,00	APBD		2	Dokumen	Rp 103.500.000,00
5	3	2	2,04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Bandung	0	Dokumen	Rp -	APBD		0	Laporan	
5	3	2	2,04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kabupaten Bandung	6	Orang	Rp 149.240.000,00	APBD		6	Orang	Rp 211.000.000,00
5	3	2	2,04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kabupaten Bandung	326	Orang	Rp 2.990.500,00	APBD		326	Orang	Rp 8.776.000,00
5	3	2	2,04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kabupaten Bandung	40	Orang	Rp 40.000.000,00	APBD		3	Orang	Rp 40.000.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	3	2	2,04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Bandung	20	Laporan	Rp 35.279.500,00	APBD		20	Laporan	Rp 80.000.000,00
5	3	2	2,04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kabupaten Bandung	40	Dokumen	Rp 28.950.000,00	APBD		40	Dokumen	Rp 40.000.000,00
5	3	2	2,04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Kabupaten Bandung	1	Laporan	Rp 15.000.000,00	APBD		1	Laporan	Rp 15.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							Kabupaten Bandung			Rp 6.012.068.900,00	APBD				Rp 2.794.964.000,00
5	4	2	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Kabupaten Bandung	82	Persen	Rp 6.012.068.900,00	APBD		85	Persen	Rp 2.794.964.000,00
5	4	2	2,01	0	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi	Kabupaten Bandung	3	Persen	Rp 961.586.000,00	APBD		3	Persen	Rp 820.000.000,00
5	4	2	2,01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Kabupaten Bandung	1	Dokumen	Rp 113.701.000,00	APBD		1	Dokumen	Rp 35.000.000,00
5	4	2	2,01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kabupaten Bandung	399	Orang	Rp 830.705.000,00	APBD		100	Orang	Rp 750.000.000,00
5	4	2	2,01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Kabupaten Bandung	1	Dokumen	Rp 17.180.000,00	APBD		1	Dokumen	Rp 35.000.000,00
5	4	2	2,02	0	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kabupaten Bandung	3	Persen	Rp 5.050.482.900,00	APBD		3	Persen	Rp 1.974.964.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	4	2	2,02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Kabupaten Bandung	1	Dokumen	Rp 3.710.000,00	APBD		1	Dokumen	Rp 5.000.000,00
5	4	2	2,02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Kabupaten Bandung	100	Orang	Rp 79.680.000,00	APBD		100	Orang	Rp 100.000.000,00
5	4	2	2,02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Bandung	1195	Laporan	Rp 4.960.042.900,00	APBD		100	Laporan	Rp 1.839.964.000,00
5	4	2	2,02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Kabupaten Bandung	1	Dokumen	Rp 7.050.000,00	APBD		1	Dokumen	Rp 30.000.000,00
5	4	2	02:03	0	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Kabupaten Bandung	0,00	Persen	Rp -	APBD		0,09%	Persen	Rp -
5	4	2	02:03	2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Kabupaten Bandung	0	Orang	Rp -	APBD		15	Orang	Rp -
					Jumlah 2					Rp 10.633.245.838,00					Rp 6.288.720.000,00
Jumlah Total										Rp 39.441.093.204,49					Rp 36.855.878.000,00



BAB IV RENCANA PENDANAAN

4.1. Kebutuhan Anggaran Belanja BKPSDM

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa dana semua itu akan sia-sia.

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Mitra Perencanaan Pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung melakukan verifikasi dengan bertugas meneliti dan memeriksa semua Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. RKA SKPD tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025.

Berpedoman berdasarkan rencana kerja yang akan dicapai sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya pagu anggaran pada tahap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung sebagai bahan penyusunan rancangan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025. Setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung segera menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-SKPD). Proses mengenai Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sama dengan anggaran sebelum adanya Perubahan. Untuk rencana anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebesar. **Rp. 39.441.093.204,49** (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Koma Empat Puluh Sembilan Rupiah*).

Tabel 8 Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja BKPSDM Tahun 2025

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
A.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik	5	3	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai Sakip Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	84.70 Poin	28.807.847.366,49	APBD	
								- Presentase Aset Dalam Kondisi Baik		94 Persen			
A.1		5	3	1	2,01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	BKPSDM Kabupaten Bandung	100 Persen	64.886.817,90	APBD	
A.1.1		5	3	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	4 Dokumen	18.650.000,00	APBD	
A.1.2		5	3	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	2 Dokumen	6.844.600,00	APBD	
A.1.3		5	3	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	2 Dokumen	12.720.000,00	APBD	
A.1.4		5	3	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	2 Dokumen	3.720.000,00	APBD	
A.1.5		5	3	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	2 Dokumen	3.720.000,00	APBD	
A.1.6		5	3	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	1 Laporan	1.720.000,00	APBD	
A.1.7		5	3	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	7 Laporan	17.232.217,90	APBD	
A.1.8		5	3	1	2,01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	BKPSDM Kabupaten Bandung	1 Dokumen	140.000,00	APBD	

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
A.1.9		5	3	1	2,01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	70 Data	140.000,00	APBD	
A.2		5	3	1	2,02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	BKPSDM Kabupaten Bandung	100 Persen	26.944.051.733,59	APBD	
A.2.1		5	3	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kabupaten Bandung	65 Orang/bulan	26.924.101.733,59	APBD	
A.2.2		5	3	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	1 Laporan	8.550.000,00	APBD	
A.2.3		5	3	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	8 Laporan	11.400.000,00	APBD	
A.3		5	3	1	2,05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis	BKPSDM Kabupaten Bandung	100 Persen	5.392.700,00	APBD	
A.3.1		5	3	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BKPSDM Kabupaten Bandung	1 Paket	5.000.000,00	APBD	
A.3.2		5	3	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kabupaten Bandung	0 Orang	392.700,00	APBD	
A.3.3		5	3	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kabupaten Bandung	0 Orang	-	APBD	
A.4		5	3	1	2,06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	BKPSDM Kabupaten Bandung	100 Persen	347.548.650,00	APBD	
A.4.1		5	3	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	1 Paket	15.000.000,00	APBD	
A.4.2		5	3	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	4 Paket	116.973.600,00	APBD	

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
A.4.3		5	3	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	12 Paket	41.516.500,00	APBD	
A.4.4		5	3	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	2 Paket	32.418.800,00	APBD	
A.4.5		5	3	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	3 Dokumen	11.000.000,00	APBD	
A.4.6		5	3	1	2,06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	BKPSDM Kabupaten Bandung	12 Laporan	8.900.000,00	APBD	
A.4.7		5	3	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kabupaten Bandung	177 Laporan	121.739.750,00	APBD	
A.5		5	3	1	2,07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	100 Persen	111.430.000,00	APBD	
A.5.1		5	3	1	2,07	6	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel yang dibeli	BKPSDM Kabupaten Bandung	0 Unit	-	APBD	
A.5.2		5	3	1	2,07	5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	20 Unit	111.430.000,00	APBD	
A.6		5	3	1	2,08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	BKPSDM Kabupaten Bandung	100 Persen	1.083.267.465,00	APBD	
A.6.1		5	3	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kabupaten Bandung	9000 Laporan	12.100.000,00	APBD	
A.6.2		5	3	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	12 Laporan	19.997.325,00	APBD	
A.6.3		5	3	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	0 Laporan	-	APBD	
A.6.4		5	3	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kabupaten Bandung	12 Laporan	1.051.170.140,00	APBD	

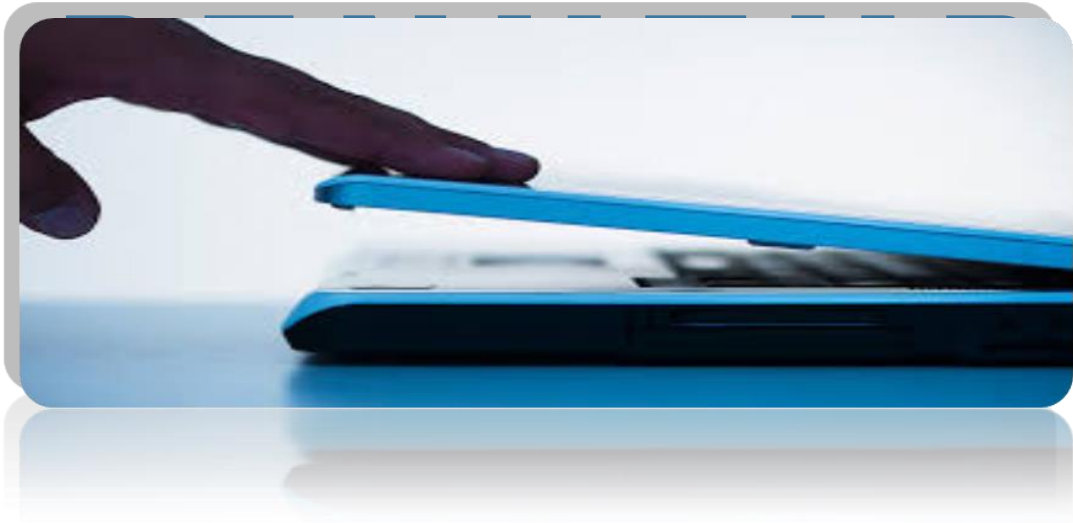
No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
A.7		5	3	1	2,09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	BKPSDM Kabupaten Bandung	94 Persen	251.270.000,00	APBD	
A.7.1		5	3	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKPSDM Kabupaten Bandung	0 Unit	-	APBD	
A.7.2		5	3	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BKPSDM Kabupaten Bandung	23 Unit	211.270.000,00	APBD	
A.7.3		5	3	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKPSDM Kabupaten Bandung	27 Unit	40.000.000,00	APBD	
A.7.4		5	3	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM Kabupaten Bandung	0 Gedung	-	APBD	
A.7.5		5	3	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM Kabupaten Bandung	0 Unit	-	APBD	
A.8		5	3	1	2,13	0	Penataan Organisasi	Presentase Ketersediaan Dokumen Keorganisasian	BKPSDM Kabupaten Bandung	0 Persen	-	APBD	
A.8.1		5	3	1	2,13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	BKPSDM Kabupaten Bandung	0 Dokumen		APBD	
		Jumlah 1									28.807.847.366,49		
B.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	5	3	2	0	0	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN	Kabupaten Bandung	87 Persen	4.621.176.938,00	APBD	
B.1		5	3	2	2,01	0	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kabupaten Bandung	100 Persen	2.988.249.388,00	APBD	
B.1.1		5	3	2	2,01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	17.589.000,00	APBD	
B.1.2		5	3	2	2,01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	19.882.000,00	APBD	

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
B.1.3		5	3	2	2,01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	2.254.731.980,00	APBD	
B.1.4		5	3	2	2,01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Kabupaten Bandung	1 Laporan	5.518.263,00	APBD	
B.1.5		5	3	2	2,01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Bandung	1200 Dokumen	108.452.200,00	APBD	
B.1.6		5	3	2	2,01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	38.931.000,00	APBD	
B.1.7		5	3	2	2,01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kabupaten Bandung	2 Lembaga	249.840.000,00	APBD	
B.1.8		5	3	2	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	272.704.945,00	APBD	
B.1.9		5	3	2	2,01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Bandung	5000 Dokumen	14.400.000,00	APBD	
B.1.10		5	3	2	2,01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Bandung	1 Laporan	6.200.000,00	APBD	
B.2		5	3	2	2,02	0	Mutasi dan Promosi ASN	Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi	Kabupaten Bandung	90 Persen	305.632.800,00	APBD	
B.2.1		5	3	2	2,02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kabupaten Bandung	40 Dokumen	58.644.500,00	APBD	
B.2.2		5	3	2	2,02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Bandung	1750 Dokumen	41.546.000,00	APBD	
B.2.3		5	3	2	2,02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	205.442.300,00	APBD	
B.3		5	3	2	2,03	0	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN	Kabupaten Bandung	100 Persen	962.530.750,00	APBD	
B.3.1		5	3	2	2,03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kabupaten Bandung	500 Dokumen	658.990.000,00	APBD	
B.3.2		5	3	2	2,03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Kabupaten Bandung	100 Orang	198.449.000,00	APBD	
B.3.3		5	3	2	2,03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	-	APBD	

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
B.3.4		5	3	2	2,03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Kabupaten Bandung	40 Orang	56.257.500,00	APBD	
B.3.5		5	3	2	2,03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kabupaten Bandung	8 Orang	48.834.250,00	APBD	
B.4		5	3	2	2,04	0	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN Yang Berkinerja Baik	Kabupaten Bandung	95 Persen	364.764.000,00	APBD	
B.4.1		5	3	2	2,04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	27.445.000,00	APBD	
B.4.2		5	3	2	2,04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	65.859.000,00	APBD	
B.4.3		5	3	2	2,04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	-	APBD	
B.4.4		5	3	2	2,04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kabupaten Bandung	6 Orang	149.240.000,00	APBD	
B.4.5		5	3	2	2,04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kabupaten Bandung	326 Orang	2.990.500,00	APBD	
B.4.6		5	3	2	2,04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kabupaten Bandung	40 Orang	40.000.000,00	APBD	
B.4.7		5	3	2	2,04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Bandung	20 Laporan	35.279.500,00	APBD	
B.4.8		5	3	2	2,04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kabupaten Bandung	40 Dokumen	28.950.000,00	APBD	
B.4.9		5	3	2	2,04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Kabupaten Bandung	1 Laporan	15.000.000,00	APBD	
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							Kabupaten Bandung		6.012.068.900,00	APBD	
C.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	5	4	2	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Kabupaten Bandung	82 Persen	6.012.068.900,00	APBD	
C.1		5	4	2	2,01	0	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi	Kabupaten Bandung	3 Persen	961.586.000,00	APBD	
C.1.1		5	4	2	2,01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	113.701.000,00	APBD	

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
							Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						
C.1.2		5	4	2	2,01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kabupaten Bandung	399 Orang	830.705.000,00	APBD	
C.1.3		5	4	2	2,01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	17.180.000,00	APBD	
C.2		5	4	2	2,02	0	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kabupaten Bandung	3 Persen	5.050.482.900,00	APBD	
C.2.1		5	4	2	2,02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	3.710.000,00	APBD	
C.2.2		5	4	2	2,02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Kabupaten Bandung	100 Orang	79.680.000,00	APBD	
C.2.3		5	4	2	2,02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Kabupaten Bandung	1195 Laporan	4.960.042.900,00	APBD	

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
							Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					
C.2.4		5	4	2	2,02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	7.050.000,00	APBD	
C.3		5	4	2	02:03	0	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Kabupaten Bandung	0,00 Persen	-	APBD	
C.3.1		5	4	2	02:03	2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Kabupaten Bandung	0 Orang	-	APBD	
		Jumlah 2									10.633.245.838,00		
		Jumlah Total									39.441.093.204,49		



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD), Rencana Strategik (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dengan memperhatikan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai kesepakatan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung 2025 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor

kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program - program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung untuk 2025.

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung 2025 merupakan penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan. Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung tahun 2025 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Ttd

TATANG KUSNAWAN

BUPATI BANDUNG

ttd

MUHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Tabel 9 Pengendalian Dan Evaluasi Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung (Form E.70)

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan Data dan Informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-perangkat daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra-perangkat daerah.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
6	Penelaahan Rancangan RKPD.	√			
7	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.		√	Tidak ada usulan masyarakat	
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten.	√			
10a.	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		√	Tidak ada usulan masyarakat	
10b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
10c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran teadu.	√			

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerahtelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan.	√			

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Ttd

TATANG KUSNAWAN